

IMPLEMENTASI MBKM MELALUI RISET ANALISIS FILOSOFIS ATAS PEMIKIRAN JACQUES RANCIÈRE MENURUT TODD MAY DALAM RELEVANSINYA DENGAN GERAKAN POLITIK DI INDONESIA

Fredy Rahalus^{1*)}, Bellinda Octavanny Berliana Putri¹⁾

¹⁾ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang, Kota Malang

*Email Korespondensi: fredyrahalus@gmail.com

ABSTRAK

Todd May, sebagaimana ia meringkas pemikiran Rancière tentang demokrasi berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan demokrasi bukanlah tentang bentuk sebuah pemerintahan atau tatanan sosial. Demokrasi adalah tindakan subjektifikasi politik yang mengganggu tatanan sosial yang dilakukan oleh *demos* untuk memverifikasi kesetaraannya. Tindakan tatana politik *demos* selalu berupa ketidaksepakatan (*dissensus*). Proses verifikasi dari *demos* yang mengganggu tatanan politis sehari-hari (*police*) inilah yang disebut Todd May politik demokrasi. Tindakan *demos* tersebut, mengandaikan kesetaraan dan bertitik tolak pada kesetaraan dengan hasil emansipasi. Yang disebut sebagai *demos* adalah orang-orang yang dalam tatanan sosial dianggap tidak memiliki bagian, tidak diperhitungkan, seperti kaum kulit hitam, perempuan, masyarakat pribumi, kaum buruh, orang-orang miskin, orang pada umumnya yang dipandang dan diperlakukan tidak setara dalam tatanan sosial dominan. Keberadaan mereka dalam tatanan sosial tidak teridentifikasi. Menurut Rancière, dengan gerakan demokrasi *demos* maka mereka yang tidak teridentifikasi sebelumnya dapat diidentifikasi kembali. Tindakan memverifikasi kesetaraan yang dilakukan oleh *demos* merupakan upaya menemukan keberadaan kesetaraan di dalam *police*. Kemunculan *demos* mentransformasi tatanan sosial menjadi bentuk yang berbeda, yang mengakomodasi keberadaan mereka yang tidak terhitung (*demos, the wrong*) di dalam *police*.

Kata kunci: Gerakan politik, kesetaraan, demokrasi, *demos*

ABSTRACT

Todd May, as he summed up Rancière's thoughts on democracy, argues that what is meant by democracy is not about the form of a government or social order. Democracy is an act of political subjectivity that disrupts the social order by demos to verify equality. Demos political order always takes the form of disagreement (dissensus). The verification process of demos that disrupts the day-to-day political order (police) is what Todd May calls democratic politics. The demos action presupposes equality and starts on equality with the result of emancipation. The so-called demos are people who in the social order are considered to have no part, are not taken into account, such as blacks, women, indigenous people, workers, the poor, people in general who are considered and treated unequally in the social order dominant. Their presence in the social order is not identified. According to Rancière, with the democratic demos movement those who were not previously identified could be identified again. The act of verifying equality by demos is an effort to find the existence of equality within the police. The emergence of demos transforms the social order into different forms, which accommodate their countless existence (demos, the wrong) in the police.

Keywords: *political movements, equality, democracy, demos*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini, bangsa Indonesia sedang dihadapkan dengan berbagai macam gerakan politik yang mana oleh para penggerak dan anggota gerakan tersebut menyebut bahwa latar belakang gerakan mereka didorong atas dasar kesadaran

kesetaraan (kita adalah setara satu sama lain), atas dasar dorongan moral demi memperjuangkan hak-hak warga negara yang dianggap diperlakukan tidak adil oleh para elit politik dan penguasa. Dalam banyak gerakan politik dewasa ini, keharusan kita sebagai civitas akademik untuk menganalisis lahir dan berkembangnya berbagai macam gerakan tersebut adalah sebuah bentuk panggilan pertanggungjawaban intelektual yang harus sesegera mungkin dilakukan. Menurut Rancière¹, perjuangan hak kesetaraan di antara berbagai macam gerakan politik harus diperjuangkan saat ini dan bukan nanti.

Di samping itu, dalam perspektif kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin oleh Konstitusi kita dan dalam konteks negara demokrasi, aksi massa menjadi hal umum yang dilakukan guna menekan segala bentuk tindak lakupemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Aksi massa dalam sejarah Indonesia sebagai bangsa, menjadi tradisi politik tertentu. Segala bentuk dinamika politik kebangsaan dan transisi politik pemerintahan tidak terlepas dari pengaruh politik aksi massa. Artinya, aksi massa memiliki tradisi atau kebudayaan tertentu pada setiap masa. Contohnya, beragam gerakan pada masa periode pergerakan nasional atau pra-kemerdekaan, demokrasi terpimpin, orde baru, reformasi hingga kini pasca reformasi masing-masing memiliki corak dan karakteristiknya.

Di satu sisi lain lagi misalnya, gerakan massa tentu meninggalkan jejak- jejak baik dan kurang baik. Misalnya, jejak baiknya adalah gerakan massa pada “Aksi Mei 98” mampu menumbangkan rezim kelaliman otoriter Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Namun, jejak kurang baiknya ialah, setiap gerakan yang muncul bisa dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian secara materil dan moral negara itu sendiri. Ditambah lagi, setiap gerakan sering ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan politik tertentu. Kemudian muncul narasi besar bahwa demokrasi kita sebagaimana ia mengidealkan kebebasan, termasuk di dalam kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum adalah demokrasi yang kebablasan.

Di dalam negara dengan sistem demokrasi, gerakan massa dalam berbagai bentuk untuk menyampaikan aspirasinya mendapat hak legitimasinya karena dilindungi dan dijamin oleh Konstitusi Indonesia, yaitu kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28. Sehingga dengan demikian, segala gerakan dengan orientasi menyampaikan pendapat di muka umum adalah sah dan dijamin konstitusi. Namun, demokratisasi di Indonesia yang tengah berproses, diam- diam masih mengakomodasi para aktor yang berpotensi menggagalkan cita-cita bangsa. Karena disinyalir ada yang menunggangi dan memanfaatkan pelegalan dari kebebasan berpendapat di depan umum ini sebagaimana diidealkan oleh demokrasi itu sendiri.

Di antara mereka adalah anggota militer, aktor-aktor Orde Baru, juga para pembangkang moderat yang berhasil mempertahankan organisasi sosio-religius dan partai politik. Saat ini, asumsi ilmiah melihat para aktor tersebut akan berubah menjadi demokrat karena berhasil menyesuaikan diri dengan institusi demokrasi liberal yang baru.

Sementara itu, kaum pro-demokrat yang telah mendorong sebagian besar perubahan akan bergabung dengan arus utama demokrasi dan berhasil meningkatkan posisi masyarakat sipil. Tetapi dalam realitanya, jikalau strategi demokratisasi telah menghasilkan kebebasan dan stabilitas yang luar biasa di Indonesia—jika dibandingkan dengan negara-negara “demokrasi baru”, sebagian besar analisis sepakat bahwa kondisi tata kelola pemerintahan (*governance*) dan representasi di negara ini masih jauh tertinggal.

Melihat dan menyimak beberapa fenomena politik di atas, pertanyaannya adalah benarkah gerakan politik dengan orientasi mengkritik kelaliman tatanan elit dan

penguasa kepada warganya merupakan gerakan yang *pure* didorong oleh panggilan moral atas nama perjuangan keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan rakyat. Ataukah ia justru menyimpan agenda lain, sebut saja seperti agenda terselubung perjuangan ideologi politik tertentu, ideologi agama tertentu, atau ideologi penguasa pasar tertentu. Persis pada dasar pemikiran inilah, tulisan ini lahir. Sebagai pisau kritis filosofis, penulis menggunakan pemikiran Ranciere tentang gerakan politik kesetaraan dalam tindakan sebagaimana dipahami oleh Todd May untuk mengkritisi berbagai macam gerakan politik dewasa ini di Indonesia dan dengan bantuan pemikiran Ranciere, tulisan ini diarahkan untuk menguji dan memilah setiap gerakan politik dewasa ini dalam konteks politik Indonesia. Maka, tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu, gerakan politik kesetaraan politik menurut Ranciere, kajian atas gerakan demokrasi dan bagaimana relevansi pemikiran Ranciere dalam konteks gerakan politik di Indonesia dewasa ini.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan *book report* (laporan buku) karya Todd May, *Contemporary Political Movements and the Thought of Jacques Ranciere- Equality in Action*. Karena artikel ini adalah laporan buku maka tulisan ini bersifat analitis-deskriptif. Dalam artikel ini, penulis menyajikan pemikiran Ranciere sebagaimana ditulis oleh Todd May kemudian analisis Todd may ini dipakai oleh penulis untuk menganalisis berbagai macam gerakan politik dewasa ini di Indonesia. Di samping itu juga, penulis menggunakan tulisan-tulisan orang lain tentang Ranciere, baik dalam bentuk artikel maupun buku untuk memperjelas pokok-pokok pemikiran Ranciere tentang gerakan politik kesetaraan dalam relevansinya dengan fenomena gerakan politik di Indonesia dewasa ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesetaraan Dalam Tindakan

Dalam pemikiran Ranciere, ide kesetaraan adalah sebuah pemikiran yang sulit dipahami. Sulit karena di satu sisi, dia ingin menghindar untuk berasimilasi dalam satu bentuk politik identitas apapun. Artinya, gerakan kesetaraan yang diidealkan oleh Ranciere harus berangkat dari kesadaran bahwa kita adalah setara bukan atas nama atau motif lain, seperti politik, identitas tertentu (etnis, suku, agama, atau ras). Bukti mendasar bahwa kita semua adalah setara adalah kesetaraan inteligensi.

Bagi Ranciere, kesetaraan inteligensi adalah titik berangkat dan bukan tujuan. Berbeda dengan para penganut ideologi *progress* yang menjadikan kesetaraan sebagai tujuan sehingga kesetaraan tidak pernah tercapai. Konsep kesetaraan Ranciere merupakan salah satu pemikiran yang unik karena ia tidak menempatkan kesetaraan sebagai tujuan. Tetapi kesetaraan ditempatkan Ranciere sebagai titik tolak.

Konsep kesetaraan Ranciere ini menjadi menarik untuk dipelajari dan diperdebatkan khususnya dalam konteks munculnya berbagai macam gerakan politik dewasa ini yang mengatasnamakan gerakan mereka sebagai gerakan atas nama kepedulian akan perlakuan setara. Namun, sebagaimana yang ditangkap dalam praktek gerakan tersebut yang nampak bukanlah ide kesetaraan di balik perjuangan tersebut, tetapi ideologi politik tertentu, identitas kelompok atas nama ras, agama, dan suku tertentu. Analisis Ranciere sebagaimana dipahami oleh Todd May, membawa dan mendorong kita semua ke sebuah kedalaman pemikiran untuk memilah gerakan-gerakan tersebut.

Menurut Ranciere, konsep pengandaian kesetaraan (*presupposition of equality*) mengindikasikan bahwa kesetaraan adalah bagi siapapun dan bagi semua orang. Kesetaraan adalah kemampuan untuk membuat kehidupan bersama yang bermakna antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kesetaraan yang lebih ingin ditekankan oleh Ranciere di sini bukanlah suatu keadaan di mana setiap individu harus

sama persis dengan yang lainnya. Misalnya, tidak semua orang memiliki kemampuan setara untuk memahami teori fisika atau memecahkan persoalan matematika. Singkatnya, “semua orang dapat memahami diri dan dunia mereka sendiri dan itu cukup untuk menciptakan kehidupan bersama yang penuh makna.

Dalam penjelasan selanjutnya, menurut Ranciere: “*There are no particular qualities one possesses that make one equal to others. In other words, politics cannot rely on an essence, whether it be blackness, the feminine, an indigenous character, ect. Politics is not the protection of particular qualities or the expression of particular essences. Equality is an equality of anyone and everyone.*”

“Tidak ada kualitas tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang membuat orang yang satu setara dengan yang lain. Dengan kata lain, politik tidak bisa dilandaskan pada ciri-ciri esensial tertentu, apakah itu kulit hitam, perempuan, karakter adat, dll. Politik bukanlah sebuah hak perlindungan atas kualitas tertentu atau ekspresi dari kepentingan tertentu. Kesetaraan adalah kesetaraan antara siapa pun dan semua orang.”

Dengan demikian, konsep kesetaraan Ranciere terjadi dalam tindakan. Kesetaraan bukanlah tujuan akhir sebuah tindakan politik, karena kesetaraan terjadi dalam tindakan. Yang dimaksudkan dengan ‘tindakan’ adalah gangguan yang dilakukan ‘*demos*’⁶ (orang-orang yang terpinggirkan dalam tatanan sosial, seperti perempuan, kaum buruh, para LGBT, orang miskin, pemulung, dsb) untuk memverifikasi (menguji) kesetaraannya. Gangguan yang dilakukan merupakan bentuk tindakan yang disebut politik. Mereka mengganggu tatanan sosial dengan bertitik tolak pada kesadaran bahwa mereka setara dengan bagian-bagian lain dari tatanan sosial dominan. Gangguan yang dilakukan oleh *demos* terhadap tatanan sosial dominan yang eksis tidak mengandung arti baik atau buruk. Politik sebagai tindakan *demos* mengganggu tatanan sosial dominan bukan berarti menempatkan tatanan sosial tersebut sebagai sistem yang menindas yang melakukan kontrol terhadap kehidupan masyarakat. Melainkan sebagai tindakan *demos* untuk mengupayakan kesetaraan dalam tatanan sosial yang telah mengabaikan keberadaan mereka (*demos*).

B. Kajian Atas Gerakan Demokrasi

“Demokrasi mesti dirawat, harus selalu diperjuangkan, karena tidak ada pilihan lain.”⁸ Sepenggal kalimat ini adalah representasi dari harapan terdalam Ranciere untuk terus berharap dan mempertahankan demokrasi. Karena tak ada pilihan lain. Lebih jauh daripada itu, Todd May sebagaimana ia memahami alam pikiran Ranciere menggunakan istilah politik demokrasi untuk memperjelas istilah ‘politik’ agar terbedakan dengan istilah politik pada umumnya yang oleh Ranciere disebut *police*. Dengan menyebut politik demokrasi maka arah pemikiran dan sarannya menjadi jelas dan tentu saja sesuai dengan konsep Ranciere tentang politik, yakni politik yang dilakukan oleh rakyat, *demos*, sebuah gerakan dari orang kebanyakan yang sebelumnya tidak ada, tidak terlihat, bagian yang tidak memiliki bagian atau tidak terhitung dalam dalam tatanan sosial dominan. Todd May, sebagaimana ia meringkas pemikiran Ranciere, berasumsi bahwa, “gerakan politik adalah pernyataan tegas atas kesetaraan (hak-hak warga masyarakat) di antara orang-orang yang meyakini dalam sebuah masyarakat.”

Kemudian, menurut Todd May sebagaimana ia memahami Ranciere, politik demokrasi adalah sebuah tindakan yang dibuat oleh *demos* dan bukan berasal dari pemberian pihak lain. Demokrasi diperjuangkan, bukannya diberikan. Demokrasi hadir bukan karena kita menerimanya tetapi hadir karena kita menciptakannya. Todd May menambahkan dari pemikirannya sendiri bahwa “gagasan ini harus dipahami bersamaan dengan pernyataan yang banyak dikutip orang bahwa kebebasan tidak diberikan, tetap diperjuangkan.”

Dengan demikian, salah satu kekuatan besar dari pandangan politik Ranciere adalah bahwa gerakan politik kesetaraan berasal dari *demos*, dari rakyat, dan bukan dari tatanan sosial dominan. Maka, sebuah politik yang demokratis, meskipun sering dimulai dari adanya *dissensus*, tentu tidak akan berakhir di situ.

Todd May, sebagaimana ia memahami aneka gerakan politik demokrasi dewasa ini yang dibangun dan diperjuangkan oleh *demos* menegaskan bahwa: "Demokrasi adalah satu hal yang masih mungkin terjadi jika kita mencarinya di tempat yang tepat. Demokrasi tidak akan kita temukan pada orang-orang yang seringkali dengan persetujuan kita-menyatakan diri sebagai pemimpin. Demokrasi juga tidak ada dalam institusi-institusi negara, meskipun mungkin pada waktunya mereka akan menampilkannya. Sebaliknya, demokrasi ada dalam diri kita, dalam keputusan yang kita ambil secara kolektif untuk berbeda pendapat dengan tatanan sosial dominan yang seringkali hadir hanya untuk menjaga eksistensi dirinya sendiri. Demokrasi adalah pilihan kita; demokrasi lahir dari tangan-tangan kita. Kita tidak harus kemudian seolah-olah bertanya dari kejauhan, apakah demokrasi masih ada. Itu pertanyaan yang salah. Kita harus sebaliknya bertanya-dan itu adalah pertanyaan yang tidak pernah berhenti ketika kita tanyakan-apakah kita siap dan bersedia untuk membangunnya."

C. Relevansi Pemikiran Ranciere Dalam Konteks Indonesia Dewasa Ini

Ranciere, sebagaimana dibahas dan diringkas oleh Todd May, sudah mengajak dan menunjukkan kepada kita akan presuposisi (pengandaian) dasar dari demokrasi yaitu kesetaraan. Kesetaraan terjadi dalam tindakan politik. Ia bukanlah tujuan akhir. Kesetaraan sebagai titik tolak bertindak untuk menentang tatanan dominan yang semakin menyingkirkan mereka yang tidak memiliki bagian, mereka yang tidak diperhitungkan. Kalau kita menimbang pemikiran Ranciere sebagaimana telah dibahas oleh Todd May, kita bisa menempatkan pemikirannya sebagai pisau kritik untuk mengkritisi perjalanan perpolitikan bangsa kita dewasa ini.

Berangkat dari analisis filosofis Ranciere sebagaimana dipahami Todd May di atas, jika dihadapkan dengan konteks bangsa kita terkait munculnya berbagai macam gerakan, gerakan demosntrasi para buruh yang menuntut upah yang adil, gerakan atas nama ideologi agama, ideologi politik identitas tertentu, gerakan masyarakat bawah yang menuntut pengakuan atas hak-hak mereka, pemikiran Ranciere juga bisa dijadikan sebagai pisau kritik untuk memilah setiap gerakan ini. Apakah gerakan ini muncul atas nama kesetaraan ataukah atas nama identitas kelompok tertentu? Oleh karena itu, menyebut pemikiran Ranciere relevan dengan konteks perpolitikan bangsa kita adalah salah satu pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis.

Selain itu, jika kita melihat fenomena politik kita sekarang ini sangat dipengaruhi dengan menguatnya ideologi tertentu, misalnya ideologi agama dan ideologi pasar. Dengan ini, penulis meyakini bahwa politik kita sudah dikuasai dan disetir oleh fundamentalisme pasar. Kaum fundamentalis ini terkadang menempatkan diri mereka sebagai yang paling tahu, paling benar, dan mereka yang paling kompeten dalam urusan publik atau untuk mengatur kehidupan bersama. Kaum fundamentalis agama merasa bahwa praktek hidup iman mereka adalah yang paling benar sehingga orang lain harus mengikuti mereka. Kaum fundamentalis pasar merasa bahwa mekanisme pasar merupakan sarana paling ampuh untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Tepai sebenarnya, di balik keinginan fundamentalis ini yang terkesan menjajikan sebuah emansipasi, justru mereka hanya ingin mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya.

Ranciere mengajak dan mengingatkan kembali kepada kita akan cita-cita yang sudah tertuang dalam Pancasila di mana kita mempunyai akses yang sama dan setara untuk aktif dalam dunia ekonomi, politik, sosial, bahkan dalam bidang religius untuk berbuat baik sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi Ranciere,

“kesetaraan adalah kemampuan untuk membuat kehidupan bersama yang bermakna antara individu satu dengan individu lainnya. Semua orang dapat memahami diri dan dunia mereka sendiri dan itu cukup untuk menciptakan kehidupan bersama yang penuh makna.”

KESIMPULAN

Setelah membaca dan sedikit banyak memahami dan mendalami buahpemikiran Ranciere dalam kerangka memilah setiap gerakan politik dewasa ini, keyakinan Ranciere bahwa gerakan politik yang dikonsepsikan oleh Ranciere adalah gerakan politik yang harus terjadi dan bersumber dari kesadaran akan kesetaraan dan tidak menjadikan kesetaraan sebagai tujuan akhir. Kesetaraan itu terjadi dalam tindakan *demos* memverifikasi atau menguji kesetaraannya sendiri. Munculnya berbagai macam gerakan massa dewasa ini di Indonesia dengan bertitik tolak dari analisis filosofis Ranciere tentang gerakan politik kesetaraan dalam tindakan, kita dapat memilah dan mempertanggungjawabkan secara filosofis akan setiap gerakan massa dewasa ini dan itu sudah cukup untuk diperdebatkan dan diperjuangkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pertukaran pelajar ini yaitu Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian Dan Purwarupa PTS tahun anggaran 2021 Sekretariat Dirjen Dikti Ristek dan Universitas Widyagama yang telah memberikan izin dan dukungan kegiatan ini.

REFERENSI

- [1] May, T. (2010). *Contemporary Political Movements and the Thought of Jacques Ranciere: Equality in Action*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- [2] Ranciere, J. (1999). *Dissagrement: Politics and Philosophy*. Mineapolis: The University of Minesota,.
- [3] Wibowo, A. S. (2012). *Anarki Dalam Demokrasi dalam majalah Basis No. 03-04, tahun ke-61*.